



PRESPEKTIF PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2008 - 2013



Sehati Sesuara Membangun NTT Baru



PROFIL NUSA TENGGARA TIMUR



➤ **Letak Geografis :**

8⁰-12⁰ LS dan 118⁰-125⁰ BT

➤ **Jumlah Pulau :**

674 buah (besar dan kecil)

➤ **Pulau yang bernama :**

432 buah

➤ **Iklim :**

**8 bulan (kemarau/kering) dan
4 bulan (hujan/basah)**

➤ **Luas Wilayah :**

**± 47.349,9 km² Daratan dan
± 200.000 km² Lautan**



Wilayah administratif :

- ⊕ **Kabupaten : 19 dan 1 kota**
- ⊕ **Kecamatan : 270 buah**
- ⊕ **Desa / Kel. : 2.836 buah**



KARAKTERISTIK DAERAH NTT

- ISOLASI FISIK
- ISOLASI EKONOMI
- ISOLASI SOSIAL

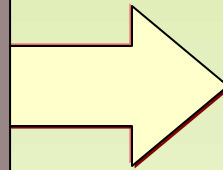
- ☰ GEOGRAFI KEPULAUAN
- ☰ TERSEBAR, KECIL-KECIL
- ☰ KOMODITAS TERBATAS
- ☰ DIPENGARUHI OLEH IKLIM

- KEMISKINAN
- BENCANA ALAM
- KELAPARAN
- SERANGAN HAMA



JUMLAH PENDUDUK NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2007

PENDUDUK NTT
4.448.873 Jiwa



Laki - Laki

2.234.452

Perempuan

2.214.421

Kepadatan Penduduk
91,98 Jiwa per km²

Laju Pertumbuhan Penduduk
1,79 % pertahun

Rekapitulasi Jumlah Kecamatan, Desa & Kelurahan Tahun 2008

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Kupang	30	218	22
2	Timor Tengah Selatan	32	228	12
3	Timor Tengah Utara	9	140	34
4	Belu	24	196	12
5	Alor	17	158	17
6	Flores Timur	18	209	17
7	Sikka	21	147	13
8	Ende	20	191	23
9	Ngada	9	78	16
10	Manggarai	9	132	17
11	Sumba Timur	22	140	16
12	Sumba Barat	6	45	8
13	Lembata	9	137	7
14	Rote Ndao	8	73	7
15	Manggarai Barat	7	116	5
16	Nagekeo	7	84	16
17	Sumba Tengah	4	43	-
18	Sumba Barat Daya	8	94	2
19	Manggarai Timur	6	104	10
20	Kota Kupang	4	-	49
J u m l a h		270	2.533	303

Sumber : Biro Pemerintahan Desa Setda Prov. NTT, tanggal 31 Januari 2008

Jumlah Penduduk Miskin Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005

No	Kabupaten	Rumah Tangga	RMTG Miskin	Persentase	Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SUMBA BARAT	77.872	71.707	92,08	366.938
2	SUMBA TIMUR	39.402	34.901	88,58	149.735
3	KUPANG	66.132	65.532	99,09	270.781
4	TIMOR TENGAH SELATAN	112.122	67.291	60,02	262.750
5	TIMOR TENGAH UTARA	66.829	30.575	45,75	126.183
6	BELU	105.428	54.224	51,43	257.085
7	ALOR	45.636	28.924	63,38	132.454
8	LEMBATA	28.225	15.675	55,54	58.813
9	FLORES TIMUR	79.263	21.342	26,93	92.508
10	SIKKA	93.598	34.014	36,34	153.469
11	ENDE	64.063	29.229	45,63	131.204
12	NGADA	60.851	22.950	37,72	113.369
13	MANGGARAI	100.433	72.948	72,63	355.581
14	ROTE NDAO	23.313	22.693	97,34	86.816
15	MANGGARAI BARAT	52.407	27.688	52,83	133.317
16	KUPANG	47.580	23.444	49,27	107.869
	JUMLAH	1.063.154	623.137	58,61	2.798.872

Sumber : BPS Prov. NTT Tahun 2005



PERBANDINGAN INDIKATOR DI TINGKAT NASIONAL DAN PROVINSI NTT

No	Indikator	NTT	Nasional
1.	Indeks Pembangunan Manusia	63,6 (Peringkat 31 dari 33 Provinsi)	65,8
2.	Tingkat Literasi Penduduk	90,90 %	91 %
	Rata – rata lama sekolah	6,2 tahun	7,2 tahun
	APM – SD	90,98 %	96 %
	APK SMP/ MTs	64,46 %	65 %
3.	Usia Harapan Hidup	65,1 tahun	67 tahun
	Angka Kematian Ibu	554 / 100.000	334 / 100.000
	Angka Kematian Bayi	52 / 1000	36 / 1000
	Gizi Buruk Balita & Gizi Kurang	4% & 19%	8% & 19%



No	Indikator	NTT	Nasional
4.	Pertumbuhan Ekonomi (2006)	5,08 %	5,61 %
5.	Pendapatan Perkapita (2006)	Rp. 3,6 Juta	Rp. 12 Juta
6.	Pengangguran Terbuka	3,98 %	10,3 %
7.	Proporsi pembentukan PDRB :		
	- Pertanian	41,22 %	13,41 %
	- Industri Pengolahan	15,22 %	28,05 %
	- Perdagangan	22,78 %	15,74 %
	- Jasa – jasa	20,77 %	10,10 %
	- Lainnya		
8.	Proporsi Penduduk Miskin	27,58 %	17,80 %



INDIKATOR PEMBANGUNAN DI PROVINSI NTT

Indikator	Realisasi 2003	Realisasi 2006 / 2007 *	Target Indikator 2008
EKONOMI			
Pertumbuhan ekonomi	4,57%	5,50%	6%
Proporsi sektor Primer dlm pembentukan PDRB	40,68%	42,28%	33%
Proporsi penyerapan tenaga kerja menurut sektor			
Primer	81,94%	69,37%	54%
Sekunder	4,07%	8,33%	19%
Tersier	13,95%	22,26%	26%



Indikator	Realisasi 2003	Realisasi 2006 / 2007 *	Target Indikator 2008
SUMBER DAYA MANUSIA			
Tingkat literasi penduduk	100,8%	98,4%	91%
APM - SD	95,4%	98,1%	96%
APM – SMP	121,0%	109,6%	65%
Usia harapan hidup	64,4 tahun	65,1 tahun	66 tahun
Angka Kematian Ibu	554 / 100.000*	554 / 100.000	450 / 100.000
Angka Kematian Bayi	62 / 1000*	62 / 1000	45 / 1000
Gizi buruk balita & Gizi kurang	3,2% & 30,8%	10,30% & 26,5%	0% & 10%



Indikator	Realisasi 2003	Realisasi 2006 / 2007 *	Target Indikator 2008
<p>HUKUM</p> <p>Percepatan tindak lanjut temuan penyalahgunaan anggaran pemerintah (kejadian/tindak lanjut)</p>		<p>BPK: 51,28%</p> <p>IRJEN DDN: 92,72%</p> <p>Banwas Unit Provinsi: 33,27%</p> <p>Banwas Unit Kab/Kota: 84,61%</p> <p>BPKP Unit Prov.:24,19</p> <p>BPKP unit Kab/Kota:9,75%</p>	<p>Menurunkan secara signifikan</p>
<p>Penetapan Perda Provinsi</p>	<p>4469</p>	<p>3682</p>	

Permasalahan Umum Pembangunan di NTT

1. Bidang Ekonomi

Keterkaitan ekonomi antara kabupaten/kota dengan perekonomian pada tingkat propinsi relatif rendah. Kecenderungan pertumbuhan positif pada tingkat propinsi belum berimbang secara merata pada sebagian besar kabupaten/kota.

Nilai tambah sektor Pertanian relatif rendah. komoditas pertanian yang dihasilkan tidak mengalami pengolahan sebelum diperdagangkan.

Masih tingginya angka kemiskinan di NTT yang mencapai 27,58% (Pebruari 2007) dari jumlah penduduk.

Lanjutan.....

2. Bidang SDM

Masih rendahnya daya saing tenaga kerja NTT.

Masih tingginya kebutuhan untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan pendidikan bagi anak usia sekolah, serta masih rendahnya kualitas guru;

Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi.

Masih rendahnya akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak dan sumber daya kesehatan yang minim menyebabkan tingkat kesakitan masyarakat yang relatif tinggi dan berdampak pada usia harapan hidup yang relatif rendah

Lanjutan.....

3. Bidang HUKUM dan HAM

Intervensi perlindungan hukum dan HAM belum dilakukan secara cukup berarti, padahal kasus pelanggaran hukum dan HAM menunjukkan eskalasi yang mencemaskan;

Kasus kejahatan atau pelanggaran hukum makin berkembang secara kuantitatif dan kualitatif, lima kasus yang paling menonjol yang terjadi di NTT, yaitu kasus pembunuhan, pencurian, penganiayaan, kesusilaan dan pelanggaran ketertiban umum.

penciptaan pemerintahan yang bersih dari KKN harus menjadi perhatian utama, terutama dalam konteks penyalahgunaan kekuasaan (power abuse) dalam penggunaan keuangan negara.



NUSA TENGGARA TIMUR

5 TAHUN KEDEPAN





Gubernur
Drs. Frans Lebu Raya

Visi

“Pembangunan Daerah NTT 2008-2013”



Wakil Gubernur
Ir. Esthon L. Foenay. MSi


“Terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera, adil dan demokratis, dalam Bingkai Negara Republik Indonesia ”

“Misi Pembangunan Daerah NTT 2008 -2013”

1. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas, relevan, efisien, dan efektif yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat,
2. Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat;
3. Memberdayakan ekonomi rakyat dengan mengembangkan pelaku ekonomi yang mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal;
4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai agar masyarakat dapat memiliki aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak;
5. Meningkatkan penegakan supremasi hukum dalam rangka menjelmakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sadar hukum;
6. Meningkatkan pembangunan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup;
7. Meningkatkan akses perempuan dan anak dalam sektor publik, serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
8. Agenda Khusus : Penanggulangan kemiskinan, penanganan daerah perbatasan, Pengembangan Provinsi Kepulauan dan penanganan daerah rawan bencana.

8 PROGRAM STRATEGIS DAN ANGGUR MERAH





HARAPAN PEMBANGUNAN NTT 2008 – 2013

1. **Keberlanjutan;** Keberlanjutan dari program pembangunan yang telah dicanangkan dan dilaksanakan pada masa-masa sebelumnya;
2. **Peningkatan;** Pembangunan diarahkan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi saat ini menuju kondisi yang lebih baik;
3. **Percepatan;** Suatu gerakan dan semangat untuk memastikan pencapaian keberhasilan dan peningkatan kondisi yang lebih baik selama lima tahun;
4. **Pemberdayaan Masyarakat;** Pembangunan untuk meningkatkan kapasitas dan akses masyarakat maka dikembangkan paradigma “**Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah)**” dengan birokrasi pelayanan publik yang murah dan cepat serta mewujudkan anggaran pembangunan yang lebih besar bagi kepentingan rakyat.

Agenda Pembangunan Daerah NTT 2008 - 2013

1. Pemantapan Kualitas Pendidikan

- Peningkatan kualitas pendidikan pada semua jenis dan jenjang;
- Peningkatan relevansi pendidikan yang berdaya saing dalam percaturan global;
- Pengembangan manajemen pendidikan yang efisien;
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

2. Pembangunan Kesehatan

- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- Peningkatan kinerja institusi kesehatan;
- Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat;
- Pembudayaan pola hidup sehat.

3. Pembangunan Ekonomi

- **Peningkatan kualitas angkatan kerja;**
- **Perluasan kesempatan kerja;**
- **Revitalisasi institusi ekonomi;**
- **Peningkatan produk dan stabilitas harga produk ekonomi rakyat.**

4. Pembangunan Infrastruktur

- **Peningkatan kualitas pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana perhubungan dan komunikasi untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia;**
- **Peningkatan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana sumber daya air, irigasi embung dan bendungan;**
- **Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana perlistrikan dan mengembangkan sumber energi yang berkelanjutan;**
- **Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi.**

5. Pembenahan Sistem Hukum (Daerah) dan Keadilan

- **Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;**
- **Revitalisasi dan refungsionalisasi institusi penegak hukum;**
- **Pembentukan dan pembaharuan peraturan daerah yang responsif dan partisipatif;**
- **Peningkatan upaya untuk mewujudkan masyarakat yang berperspektif HAM;**
- **Pengembangan budaya hukum birokrasi ke arah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.**

6. Konsolidasi Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- **Konsolidasi perencanaan tata ruang wilayah;**
- **Peningkatan Pemantauan, Pengawasan dan Pengaturan Pemanfaatan Ruang;**
- **Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan.**

7. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan, Kesejahteraan Anak dan Partisipasi Pemuda

- **Peningkatan pemberdayaan perempuan untuk menjelmakan keadilan dan kesetaraan gender;**
- **Peningkatan perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi anak;**
- **Peningkatan pembinaan pemuda.**

8. Agenda Khusus

- **Penanggulangan Kemiskinan;**
- **Penanganan Daerah Perbatasan;**
- **Pengembangan Provinsi Kepulauan;**
- **Penanganan Daerah Rawan Bencana.**



SASARAN

- **Teridentifikasinya isu strategis (potensi dan permasalahan)**
- **Tersusunnya landasan konseptual dalam penanganan WILAYAH**
- **Tersusunnya skenario pengembangan**
- **Terumuskannya konsep strategi pengembangan WIALAYAH untuk jangka menengah (5 tahun)**
- **Tersedianya acuan regional dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**

TANTANGAN (1)

1. PENGUATAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA

- Penguatan solidaritas dan modal sosial
- Penguatan kemandirian berbasis keterampilan dan kearifan lokal
- Harmonisasi budaya lokal bagi pembangunan
- Pengaruh Antar Kabupaten

2. PENGEMBANGAN SDM

- Pendidikan dan Pelatihan
- Pengembangan *Research and Development*: teknologi produksi, teknologi informasi dan teknologi komunikasi

3. PERTUMBUHAN EKONOMI BERKUALITAS

- Pertumbuhan berkesinambungan (*sustainable growth*)
- Penciptaan lapangan kerja
- Pengurangan kemiskinan
- Keserasian pertumbuhan antar daerah

4. PENGEMBANGAN WILAYAH (DARAT, LAUT DAN UDARA)

- Pengembangan Pusat Pertumbuhan: Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Sektor/Komoditas Unggulan
- Pembangunan Kawasan Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan

TANTANGAN (2)

5. PEMBANGUNAN JARINGAN INFRASTRUKTUR

- Infrastruktur pembuka isolasi daerah dan pendukung sektor unggulan
- Efisiensi jaringan infrastruktur

6. PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN

- Pemanfaatan dengan prinsip sustainability
- Identifikasi sumber-sumber baru

7. PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Alokasi pusat pertumbuhan dan kegiatan ekonomi antar ruang wilayah

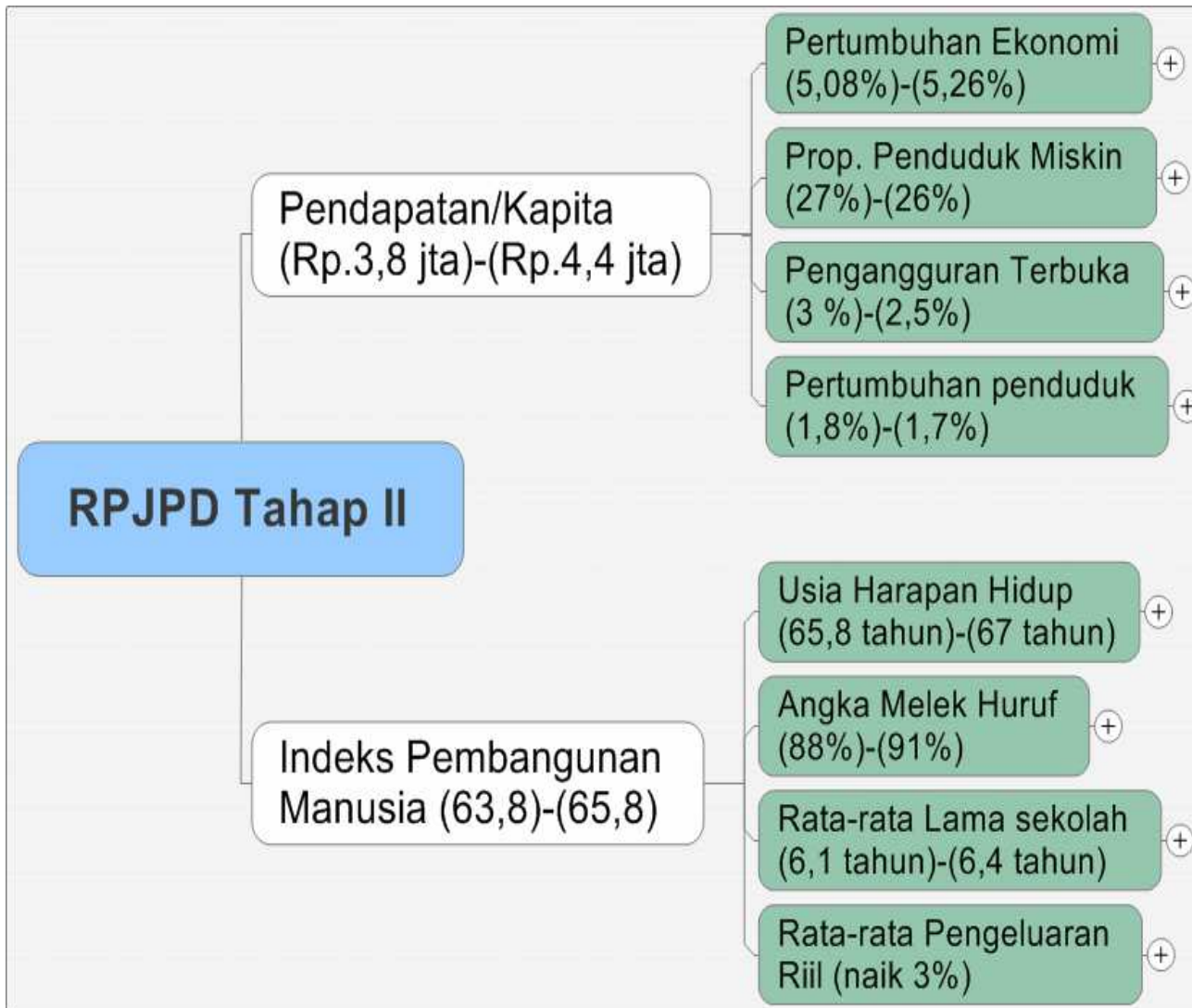
8. KERJASAMA ANTARWILAYAH

- Perdagangan antarwilayah
- Kerjasama teknis: sosial, ekonomi, teknologi dan informasi

TARGET PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2008 – 2013

- **Mengagendakan posisi tawar Provinsi NTT dalam forum Nasional, Regional dan Internasional pada Pengelolaan Sumber daya alam**
- **Menekankan penuntasan MDGs, peningkatan daya saing sumber daya manusia, kemampuan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengembangan kelembagaan keuangan ekonomi mikro serta menciptakan daya saing produk potensi daerah di pasar global.**
 - **IPM mencapai angka 68,3.**
 - **Buta aksara 10 ribu**
 - **AKB 45/1000 Kelahiran Hidup dan AKI 300/100.000 KH.**
 - **Kemiskinan 22% dan**
 - **Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,5%.**
 - **Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat**
 - **Good governance dan penegakan hukum dan HAM**
 - **Pembangunan yang responsif gender**
 - **Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan.**

Prioritas Pembangunan 2009 & Indikator Kinerja



Penetapan Indikator Kinerja

Dalam rangka mencapai dua target utama pada tahun 1 tahap 2 RPJPD, maka beberapa indikator pembentuk yang perlu diupayakan perubahannya yang nampak pada bagan berikut ini.

Empat indikator penentu Pendapatan/Kapita & empat indikator pembentuk IPM dengan kondisi terakhir serta target yang mau dicapai dalam rangka mencapai Pendapatan/Kapita serta IPM yang ditetapkan untuk tahun 2009.

Secara lebih rinci akan dijabarkan kedalam indikator-indikator kinerja program prioritas yang perlu dicapai sehingga dapat membawa perubahan menuju target yang sudah ditetapkan.





Prioritas Pembangunan 2009

Tema

PENUNTASAN MDGs, dengan penekanan pada “PERTUMBUHAN MELALUI PEMERATAAN”

Prioritas Nasional Ta. 2009	Prioritas Daerah Ta. 2009
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur & Energi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan yang berpijak pada pengarus-utamaan gender serta berfokus pada pengentasan masyarakat miskin; • Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan pengembangan sektor-sektor pertanian yang menciptakan nilai tambah dalam produksinya; • Mengatasi kesenjangan antar daerah dalam pertumbuhan ekonomi dengan lebih meningkatkan keterkaitan ekonomi antar sektor dan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur ekonomi lintas wilayah;
Peningkatan Pelayanan Dasar & Pembangunan Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Memperluas akses pelayanan kesehatan dasar serta meningkatkan mutu pelayanan dalam rangka meningkatkan kesehatan Ibu dan Anak serta usia harapan hidup masyarakat; • Meningkatkan daya saing masyarakat dengan memperluas akses pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan.
Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi & Pemantapan Demokrasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan daerah dalam wadah pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab.

Simpul Arah (1)

- Pembangunan wilayah belum memberikan kesejahteraan secara merata kepada seluruh penduduk.
- Perkembangan sosial ekonomi global memunculkan beberapa dampak yang terkait dengan pengembangan wilayah:
 - Peningkatan Pembangunan Sektor Riil,
 - tuntutan keterbukaan,
 - tuntutan efisiensi, produktivitas dan daya saing
 - desentralisasi,
 - peningkatan kerawanan sosial, dan
 - kesenjangan antarwilayah.

Simpul Arah (2)

- Transformasi ekonomi, sosial dan budaya, politik di daerah belum mampu mengoptimalkan sumberdaya untuk pembangunan dan kemajuan daerah.
- Daerah-daerah memiliki karakteristik geografis yang beragam dan membutuhkan perencanaan berbasis karakteristik ruang geografis
- Pengembangan wilayah di Indonesia perlu diarahkan kepada pendekatan yang lebih komprehensif dan disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan setiap masa.
- Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam memerlukan intervensi kebijakan yang berbasis kewilayahan berdasarkan pemanfaatan sumber daya setempat.

Simpul Arah (3)

- Adanya daerah-daerah perbatasan yang memiliki hukum adat yang tidak mengenal batas administrasi negara termasuk dalam hak pemanfaatan sumberdaya
- Kecenderungan perubahan iklim global yang berpengaruh terhadap pola produksi sektor tertentu dan kebutuhan infrastrukturnya
- Pembangunan harus memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang sinergi dengan pengembangan sumberdaya manusia dan lingkungan, serta tata ruang (UU No. 24 Tahun 1992 dan UU No. 26 Tahun 2007).
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 mengamanatkan pendekatan regional sebagai salah satu strategi untuk mencapai tujuan pembangunan

SECRET

TOP SECRET